



Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Webinar Nasional
“Aspek Penting Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Ibu Kota Nusantara”
19 November 2022

Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T.
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota FT UGM
Tim Ahli Tim Transisi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)

Email: yani.sunarharum@ugm.ac.id
Instagram/Twitter: @YaniSunarharum
<https://linktr.ee/YaniSunarharum>

Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan **pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata**, yaitu dengan pemindahan pusat gravitasi ke luar pulau Jawa

Ibu Kota Negara yang baru direncanakan dan dibangun dengan **standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti **pemerataan pembangunan serta pengurangan beban Jakarta** sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.



Dasar Hukum

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan:

UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara

PP No. 17/2022 tentang **PENDANAAN** dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

RPermen Bappenas tentang **KPBU IKN**

Perpres No. 63/2022 tentang **PERINCIAN RENCANA INDUK** Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 62/2022 tentang **OTORITA** Ibu Kota Nusantara

Perka Otorita IKN No. 1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara

Perpres No. 64/2022 tentang **RENCANA TATA RUANG (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN)** Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042

RPerka Otorita IKN tentang:

- RDTR WP IKN Barat
- RDTR WP KIPP
- RDTR WP IKN Timur I
- RDTR WP IKN Timur II

Perpres No. 65/2022 tentang Perolehan **TANAH** dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

RPP Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara akan melalui proses konsultasi dengan DPR RI terlebih dahulu.

RPP tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Khusus Pembiayaan di Ibu Kota Nusantara

Keterangan



Telah ditetapkan

Telah ditetapkan, namun dalam proses revisi

Belum ditetapkan

Visi dan Tujuan Ibu Kota Nusantara

01

Kota Berkelanjutan di Dunia



Aman dan Terjangkau



Selaras dengan Alam



Net zero emission



Sirkular dan Tangguh



Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses

Visi KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

02

Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan



Peluang Ekonomi Tangguh untuk Semua



Nyaman dan Efisien melalui Teknologi dan Inovasi

03

Simbol Identitas Nasional



Keindahan Indonesia – Bhineka Tunggal Ika

Otorita Ibu Kota Nusantara

Kolaborasi Tiga Kota

Infrastruktur Cerdas dan Konektivitas

Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha (KPBU)

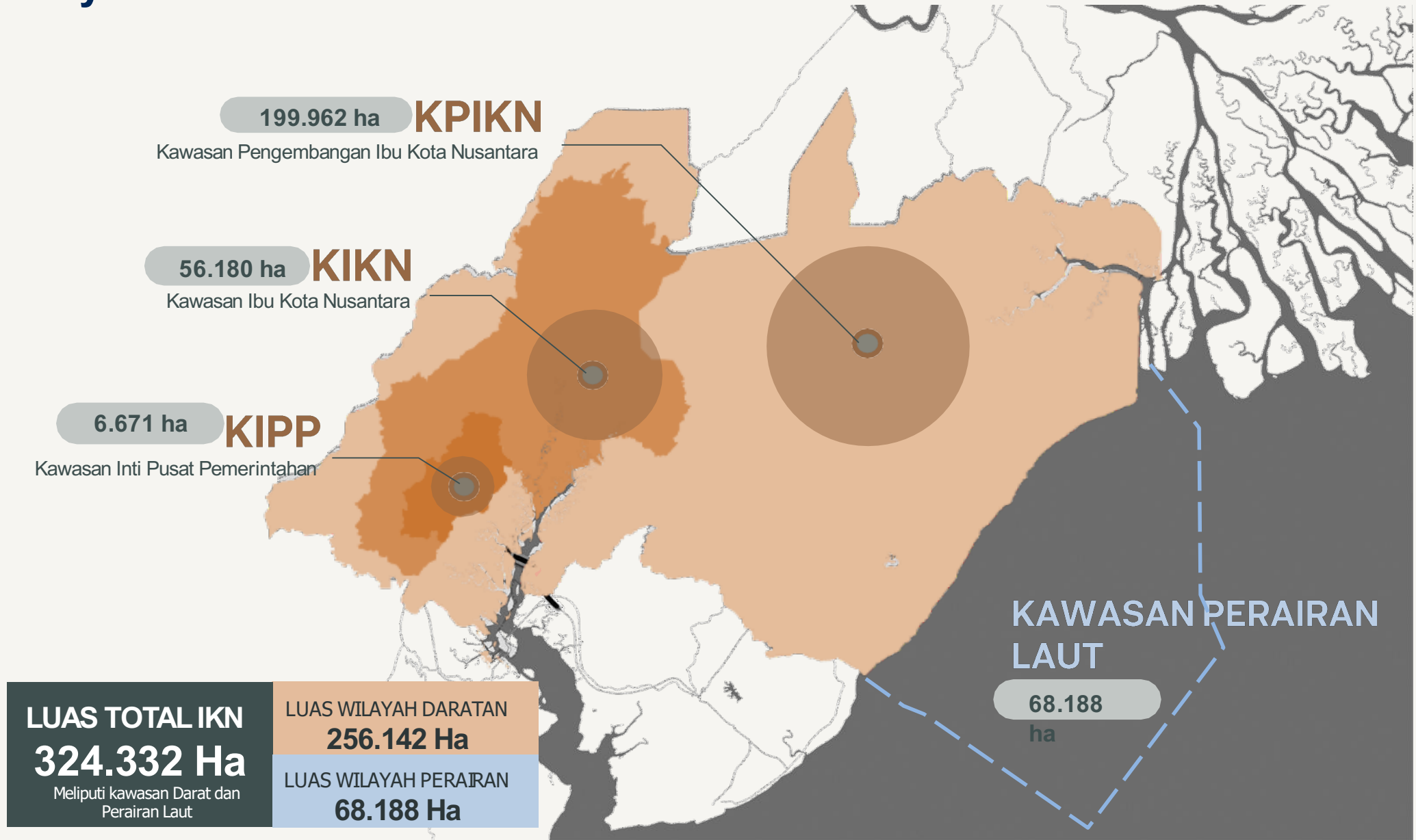
Sektor Prioritas Masa Depan

Pemerintah yang Efektif dan Efisien

ENABLERS

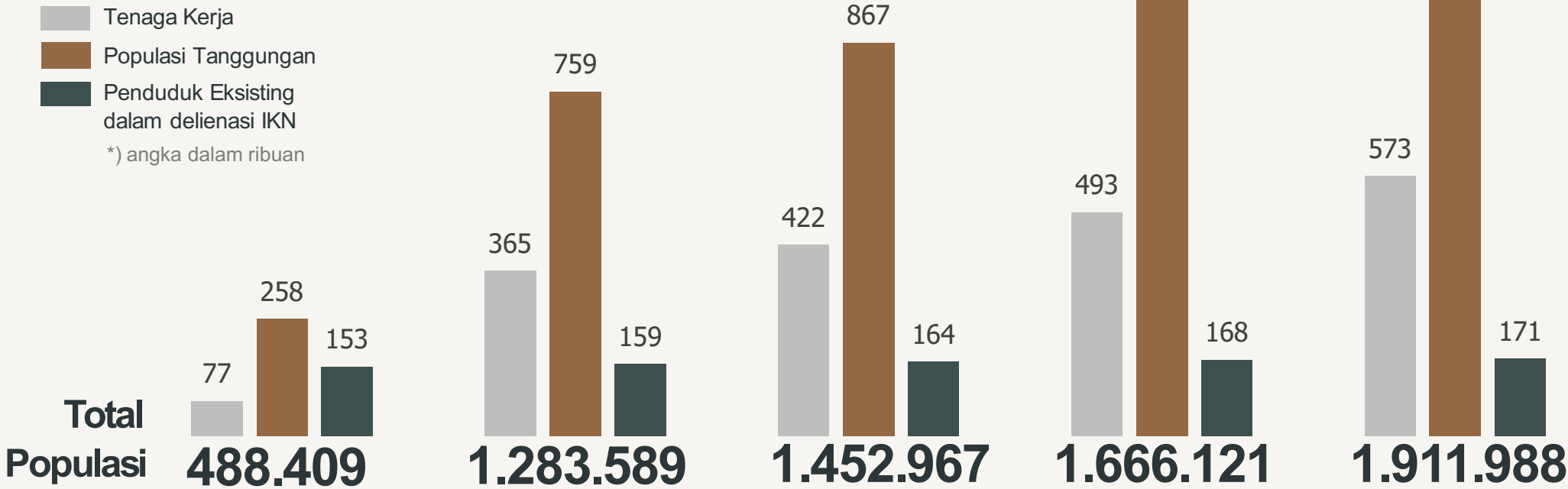
Kota Layak Huni

Wilayah Ibu Kota Nusantara



Proyeksi Jumlah Populasi Penduduk Ibu Kota Nusantara

1,7-1,9 Juta Penduduk akan menghuni 256 ribu Ha wilayah IKN di tahun 2045



I. 2022-2024

Pemindahan tahap awal

II. 2025-2029

Membangun Ibu Kota Nusantara sebagai area inti yang tangguh

III. 2030-2034

Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan lebih progresif

IV. 2035-2039

Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan

V. 2040-2045

Mengokohkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua”

Prinsip dan Indikator Kinerja Utama Pembangunan IKN

1. Selaras Dengan Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler dan Tangguh	6. Aman dan Terjangkau	7. Nyaman dan Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
<p>1.1 >75% dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)</p> <p>1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit</p> <p>1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian</p>	<p>2.1 100% integrasi seluruh penduduk</p> <p>2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit</p> <p>2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif</p>	<p>3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif</p> <p>3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik</p> <p>3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030</p>	<p>4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara</p> <p>4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung</p> <p>4.3 Net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha</p>	<p>5.1 >10% dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan</p> <p>5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045</p> <p>5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035</p>	<p>6.1 Ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045</p> <p>6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045</p> <p>6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang.</p>	<p>7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam <i>E-Government Development Index</i> (EGDI) oleh PBB</p> <p>7.2 100% konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis</p> <p>7.3 >75% kepuasan dunia usaha atas layanan digital</p>	<p>8.1 0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035</p> <p>8.2 Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi</p> <p>8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045</p>

Konsep KPI KIPP IKN

1/2

DIMENSI KPI



Kesejahteraan Masyarakat (SOS)



Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami (EKO)



Konektivitas Kawasan Transportasi (TRA)



Infrastruktur Kawasan (INF)



Infrastruktur TIK (ICT)

SUBDIMENSI KPI

Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, Lingkungan

Identitas Bangsa

Cerdas, Modern, Internasional

Sosial-Ekonomi
Sosial-Budaya

Provisi Ruang Hijau
Akses Ruang Hijau
Kualitas Iklim
Konservasi & Preservasi Alam

Sistem Transportasi Publik

Transportasi Publik & Barang

Parkir

NMT: Pejalan Kaki

NMT: Sepeda

TIK dan Kendaraan Otonom

Infrastruktur Jalan Raya

Infrastruktur Jembatan

Sumber Air

Sistem Drainase

Air Limbah Domestik

Integrasi Pengelolaan

Air Limbah dan Sampah Domestik

Persampahan

Energi

Jaringan,
Sensor dan Data TIK
Pemerintahan Elektronik

1. Kesejahteraan Masyarakat:

- 10 menit akses kepada pelayanan dasar;
- 60-70% unit hunian terlokasi untuk ASN dan TNI/POLRI;
- Hunian berimbang sesuai dengan KPI aman dan terjangkau; terjangkau untuk berbagai kelompok pendapatan masyarakat, merespons pada keberagaman tipe hunian dan tidak eksklusif hanya pada kelompok/golongan tertentu;
- Tersedia ruang publik yang inklusif dan responsif gender untuk program dan kegiatan skala nasional; dan
- Elemen/symbol representasi semua budaya Indonesia dalam ruang publik.

2. Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami:

- 50-70% ruang terbuka/area hijau;
- 40-50% konservasi tanaman lokal Kalimantan;
- 20-30% konservasi tanaman lokal Indonesia;
- 75-80% populasi terlayani akses menuju taman kota;
- 100% koridor hijau tidak terputus;
- 100% Net Zero Emission; dan
- Optimasi kualitas iklim mikro.

3. Konektivitas Kawasan/Transportasi:

- 70-80% dari pergerakan dalam kota menggunakan transportasi publik;
- 70-80% dari luas pengembangan kota terkoneksi dengan layanan trayek transportasi publik dengan jaringan pejalan kaki;
- 70-80% dari kawasan perkotaan berada kurang dari 500 (lima ratus) meter jarak berjalan kaki ke titik transportasi publik;
- Kurang dari 50 menit koneksi kereta api transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis; dan
- Integrasi fisik, jadwal, informasi, dan pembiayaan melalui sistem transportasi cerdas.

Konsep KPI KIPP IKN



Kesejahteraan Masyarakat (SOS)

10 Menit pencapaian ke fasum dan fasos dan titik transit
70% Total unit residensial teralokasi untuk ASN
 Ruang publik untuk program nasional
 Elemen/symbol representasi semua budaya Indonesia dalam ruang publik



Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami (EKO)

70-75% Area hijau
50% Konservasi tanaman lokal Kalimantan
30% Konservasi tanaman lokal Indonesia
80% Populasi terlayani akses menuju taman kota
100% Alur hijau tidak terputus
Net Zero Emission (operasional) tahun 2045
Optimisasi kualitas iklim mikro



Konektivitas Kawasan Transportasi (TRA)

80% *Transit Service Coverage* by 2045
80% *Public Transport Model Share* by 2045
<500m Jarak berjalan kaki ke simpul transit
2x Maks. Perpindahan moda
Min. 25 km/jam Kecepatan KIPP di jam puncak
<50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara tahun 2030
 Integrasi fisik, jadwal informasi, pembayaran melalui ITS



Infrastruktur Kawasan (INF)

150lt/orang/hari Konsumsi penggunaan air minum domestik
40% Pengurangan timbulan sampah melalui WTE dan Reside di TPA
50% Area pengurangan sumber air alternative kawasan
100% Penggunaan energi terbarukan



Infrastruktur TIK (ICT)

100% Akses kepada internet
 Ketersediaan **WIFI di area publik**
 Ketersediaan **fasilitas Data Center**
Pusat Kontrol Operasi Terintegrasi (IOCC) *Integrated Operations Control Center*
100% Pemerintahan elektronik (*E-Government*) dalam pelayanan publik

4. Infrastruktur Kawasan:

- Maksimum 150 liter/orang/hari kebutuhan air minum untuk penggunaan domestik;
- 60% pengolahan timbulan sampah melalui proses daur ulang, dan sisanya 40% (empat puluh persen) pengolahan timbulan sampah melalui proses menghasilkan energi dalam bentuk panas atau listrik energi dari sampah (*waste to energy*) dan/atau pengolahan sampah untuk menjadi barang (*waste to product*);
- 100% air limbah domestik terolah dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan memenuhi baku mutu, pada tahun 2035;
- 50% area penggunaan sumber air alternatif kawasan; dan
- 100% penggunaan energi terbarukan.

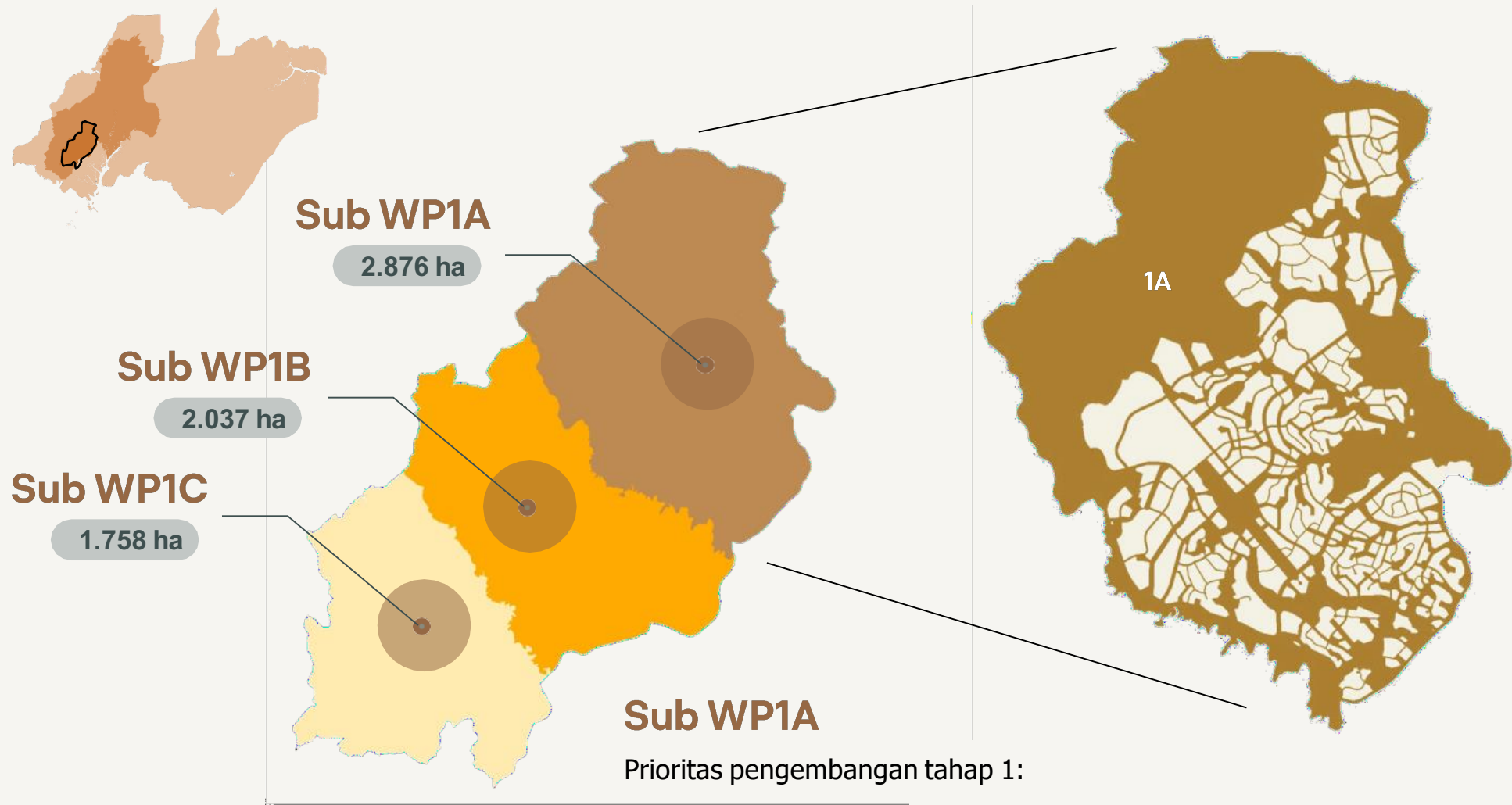
5. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:

- 100% cakupan akses internet kepada penduduk;
- Ketersediaan jaringan internet nirkabel di area publik;
- Terdapat Pusat Kontrol dan Operasi Terintegrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Integrated Operations Control Center*) sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengendalian fasilitas-fasilitas terkait dalam kota; dan
- Seluruh pelayanan publik oleh pemerintah tersedia dalam basis sistem digital.

Linimasa Pembangunan Ibu Kota Nusantara

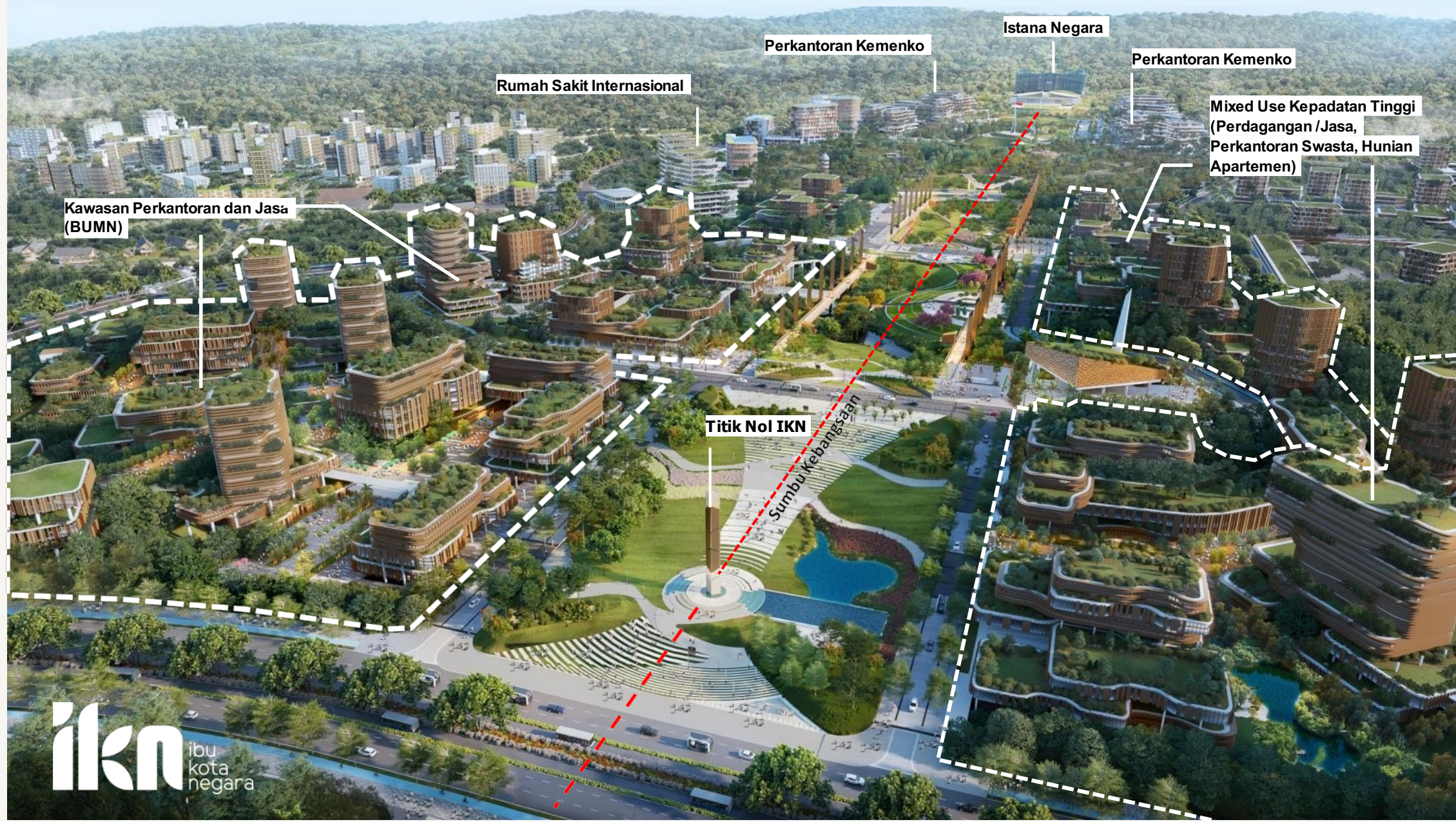


Tahap 1 – Prioritas Pengembangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan



Prioritas pengembangan tahap 1:

- Luas 2.876 hektar, dengan area pengembangan seluas 921 hektar
- Fungsi utama sebagai pusat pemerintahan





Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
seluas 6671 Ha

Bangunan Kantor Pemerintahan Didesain
dengan Menyesuaikan Kontur dan Kondisi Lahan Lokal



Konsep Pengembangan Ibu Kota Nusantara



Pengembangan Kawasan

Kota Hutan

Forest City

Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/Ruang Terbuka Hijau, dengan pendekatan lanskap terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam



Kota Spons

Sponge City

- Sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan
- Area perencanaan **berperan seperti spons** yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer



Kota Nusantara (Archipelago City)

- Pemurnian dan pemanenan air
- Ketahanan banjir
- Pelestarian dan peningkatan ekologi



Kota Berdaya Serap (Absorbent City)

- Efisiensi sistem sumber daya
- memberikan manfaat kepada masyarakat



Kota Terintegrasi (Integrated City)

Tujuan *Sponge City*

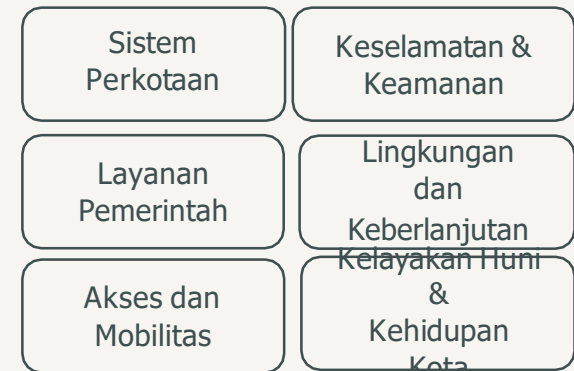
Kota Cerdas

Smart City

Komponen **smart city** mengidentifikasi elemen nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi & komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi IKN.

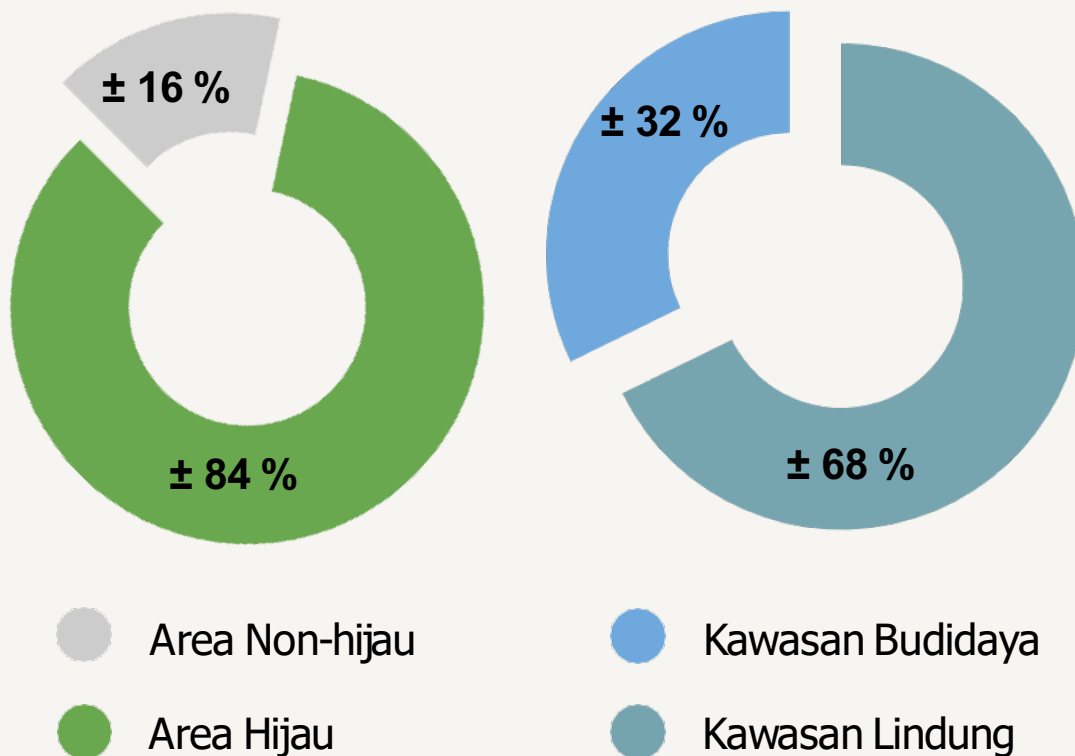
6 KATEGORI INISIATIF KOTA CERDAS

PRINSIP



IKN Sebagai Kota Hutan Yang Berkelanjutan

KPI 1.1 menunjukkan adanya komitmen IKN untuk menjaga **minimal 75%** wilayahnya sebagai ruang hijau (**65% area dilindungi + 10% area produksi pangan**) dari total luas wilayah KSN IKN seluas 256.142 hektare. Sementara itu, **Rencana Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (IKN) IKN Tahun 2022-2024**, menunjukkan rincian kawasan hijau di IKN sebagai berikut.



Usaha mewujudkan IKN sebagai Kota Hutan yang Berkelanjutan

Restorasi kawasan mangrove

Rehabilitasi lubang bekas tambang

Persemaian skala besar di Mentawir (120 ha)

Pembangunan koridor satwa (30.000 ha)

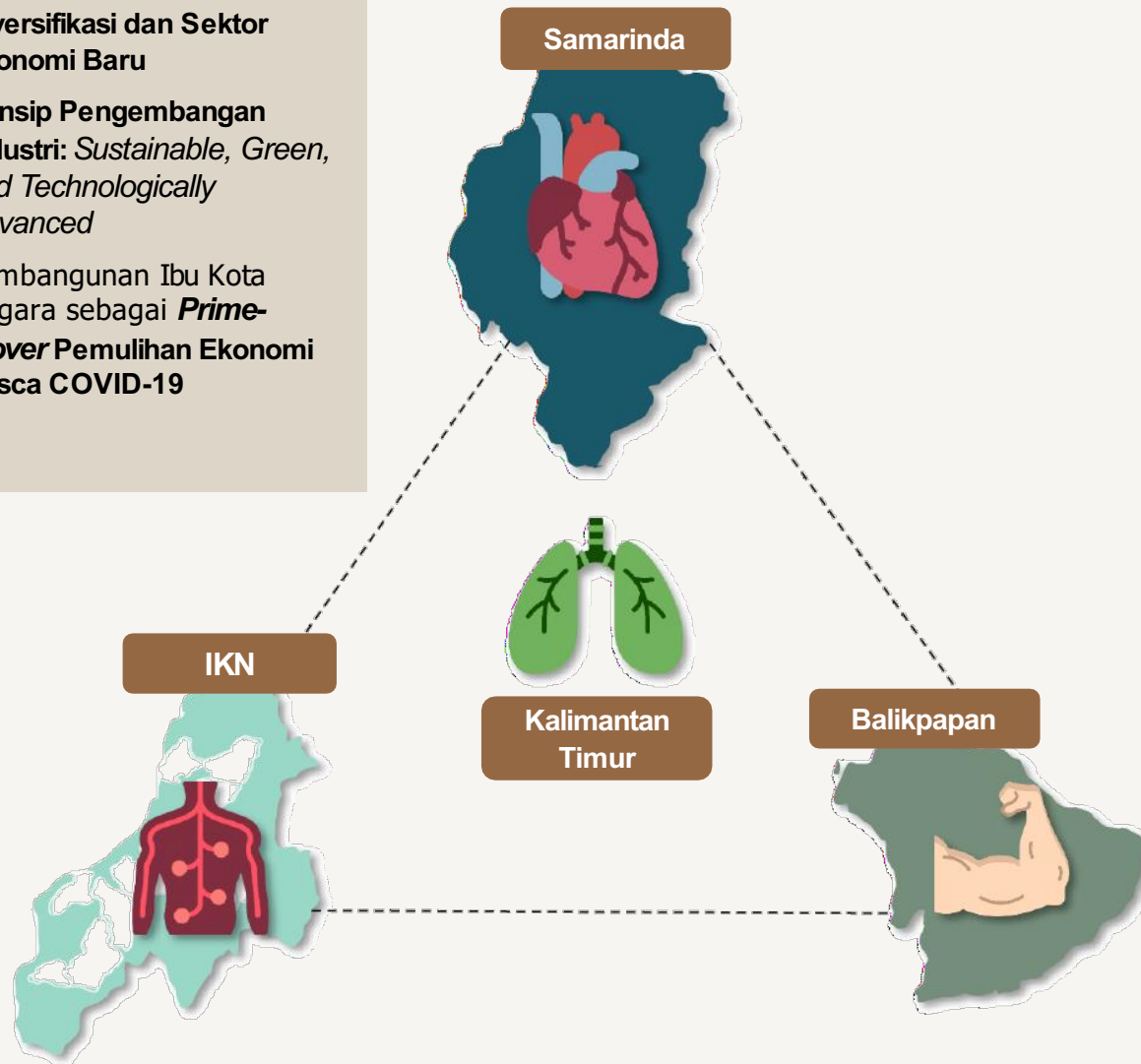
Pengembangan agroforestri

Reforestasi hutan dan taman tematik

Mesin Baru Penggerak Ekonomi

Strategi Pengembangan Ekonomi IKN dan Kalimantan Timur:

- Diversifikasi dan Sektor Ekonomi Baru
- Prinsip Pengembangan Industri: *Sustainable, Green, and Technologically Advanced*
- Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai **Prime-mover** Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19



Samarinda sebagai Jantung: Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan

- Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur
- Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan
- Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan

IKN sebagai Pusat saraf: Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini

- Pusat layanan pemerintah dan masyarakat
- Pusat inovasi dan pusat bakat
- Industri bersih dan berteknologi tinggi
- Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut

Balikpapan sebagai Otot: simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur

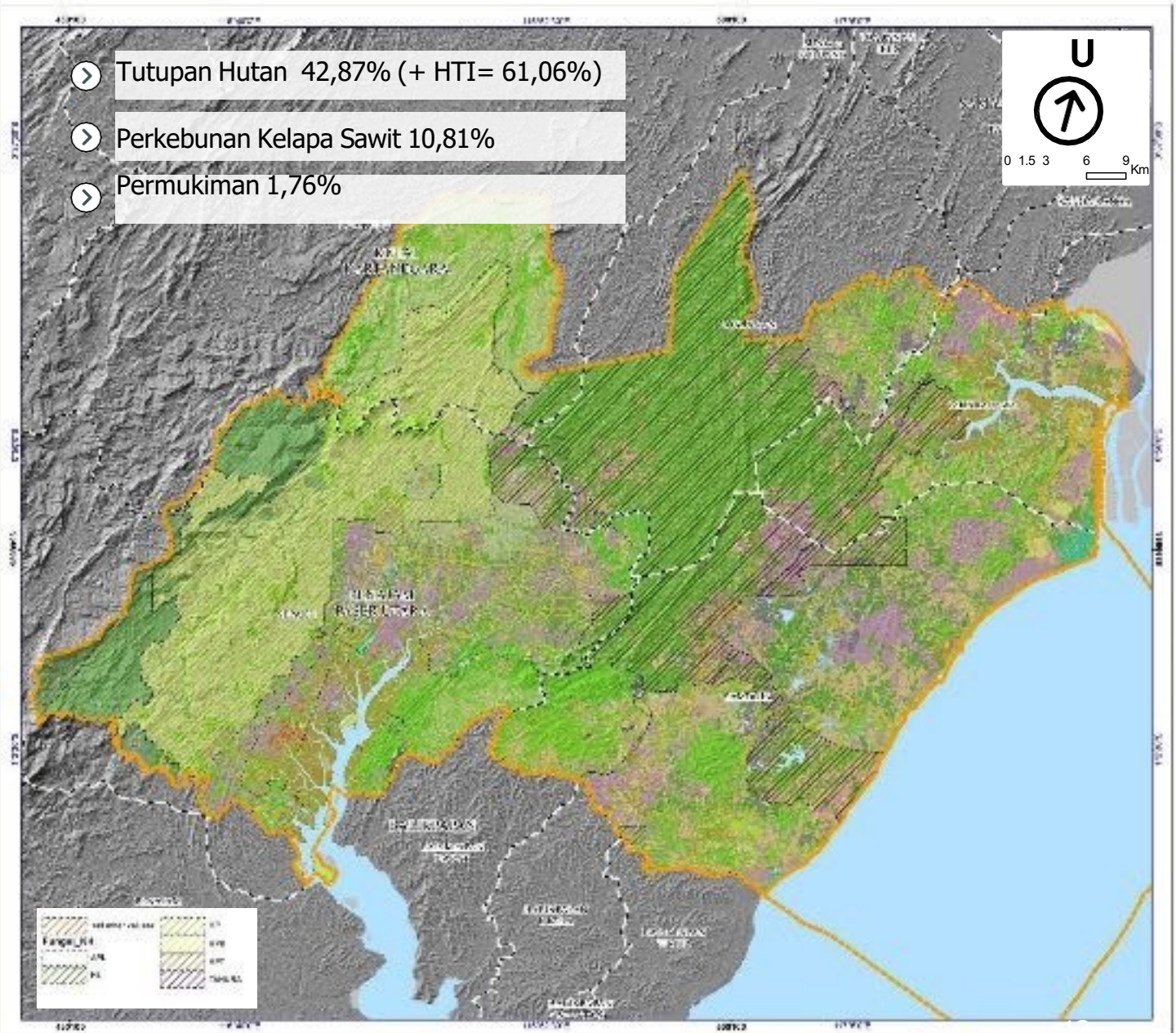
- Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & gas menjadi petrokimia
- Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah

Kalimantan Timur sebagai Paru-paru: Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam

- Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran
- Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agriindustri

Penggunaan Lahan Eksisting

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
	Bangunan Industri dan Perdagangan	166,44	0,06
	Bangunan Non Permukiman Lainnya	795,36	0,31
	Bangunan Permukiman Desa	2.676,52	1,04
	Bangunan Permukiman Kota	903,52	0,35
	Danau Lainnya	97,39	0,04
	Dermaga Laut	0,92	0,00
	Hamparan batuan/pasir lain	21,96	0,01
	Hamparan pasir pantai non vulkanik	96,16	0,04
	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah	8.819,66	3,42
	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	27.298,72	10,58
	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi	50.033,80	19,40
	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang	13.800,08	5,35
	Hutan mangrove sekunder kerapatan sedang	436,91	0,17
	Hutan mangrove sekunder kerapatan tinggi	9.537,74	3,70
	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan tinggi	643,28	0,25
	Hutan Tanaman Lain	46.919,88	18,19
	Jalan Lokal	2,57	0,00
	Jalan Tol	134,18	0,05
	Kolam air tawar lain	348,29	0,14
	Ladang/tegalan hortikultura	4.230,71	1,64
	Lahan terbuka lain	3.422,48	1,33
	Landas Pacu	1,94	0,00
	Lapangan diperkeras	8,16	0,00
	Liputan vegetasi alami/semi-alami lain	146,35	0,06
	Padang alang-alang	6,15	0,00
	Padang Rumput	176,90	0,07
	Penambangan terbuka bukan sirtu	3.770,03	1,46
	Penambangan terbuka lain	328,52	0,13
	Perairan laut dangkal	1.080,63	0,42
	Perkebunan kelapa sawit	27.894,74	10,81
	Perkebunan lain	231,08	0,09
	Rawa pedalaman	697,33	0,27
	Rawa pesisir bervegetasi	189,43	0,07
	Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	537,52	0,21
	Sawah dengan padi terus menerus	352,51	0,14
	Semak Belukar	29.184,00	11,31
	Sungai	3.306,59	1,28
	Tambak ikan/udang	826,34	0,32
	Tampungan air lain	680,61	0,26
	Tanaman Campuran	17.932,46	6,95
	Waduk irigasi	152,68	0,06
	lainnya	73,61	0,03
Wilayah Ibu Kota Nusantara		256.142,72	100



Pembagian Wilayah Perencanaan (WP)

WP KIPP

- Pusat pemerintahan nasional (istana negara, perkantoran K/L, *Diplomatic Compound*, dll)
- Pertahanan & Keamanan
- Perumahan dan Permukiman

WP IKN BARAT

- Pusat ekonomi, bisnis dan keuangan
- Pariwisata Alam
- Pelayanan Kesehatan
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN SELATAN

- Energi Baru Terbarukan (EBT)
- Permukiman Perdesaan
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 1

- Pusat Hiburan (*International Amusement Park*), *Sport Center*
- Pariwisata
- Perdagangan & Jasa
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pertahanan & Keamanan

WP IKN TIMUR 2

- Pusat Pendidikan Tinggi
- Pusat Riset & Inovasi
- Perdagangan & Jasa
- Perkantoran
- Pelayanan Kesehatan

WP IKN UTARA

- Pusat Riset & Inovasi
- Pelayanan Pendidikan Tinggi
- Pusat Perkantoran
- Pariwisata

WP IKN UTARA

Luas: 12.067 Ha

WP IKN TIMUR 2

Luas: 3.720 Ha

WP IKN BARAT

Luas: 17.206 Ha

WP IKN TIMUR 1

Luas: 9.761 Ha

WP KIPP

Luas: 6.671 Ha

WP IKN SELATAN

Luas: 6.753 Ha

WP SIMPANG SAMBOJA

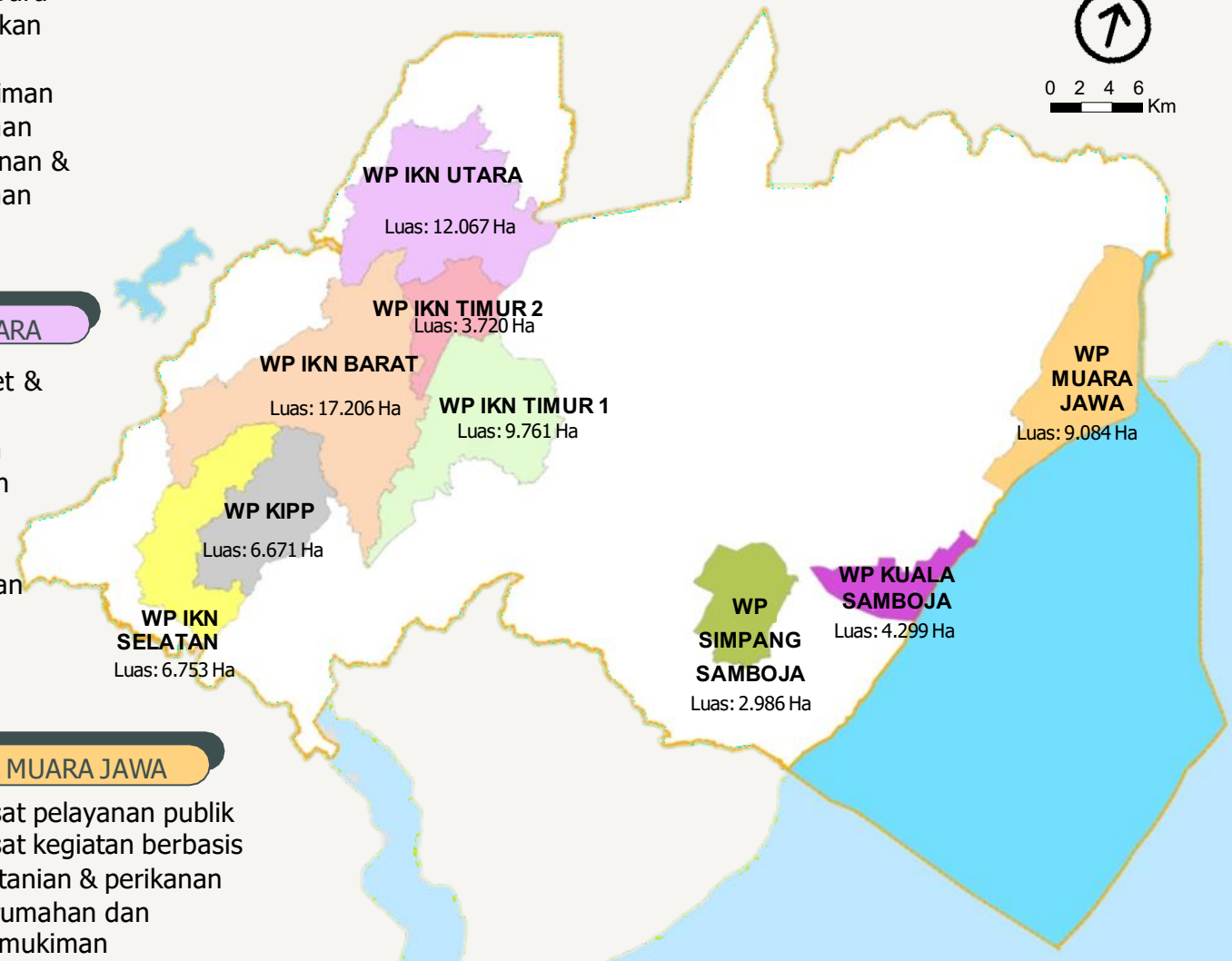
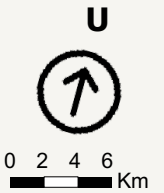
- Pusat distribusi & perdagangan komoditas kawasan
- Perumahan dan Permukiman

WP KUALA SAMBOJA

- Pusat agroindustri dan industri pangan
- Perumahan

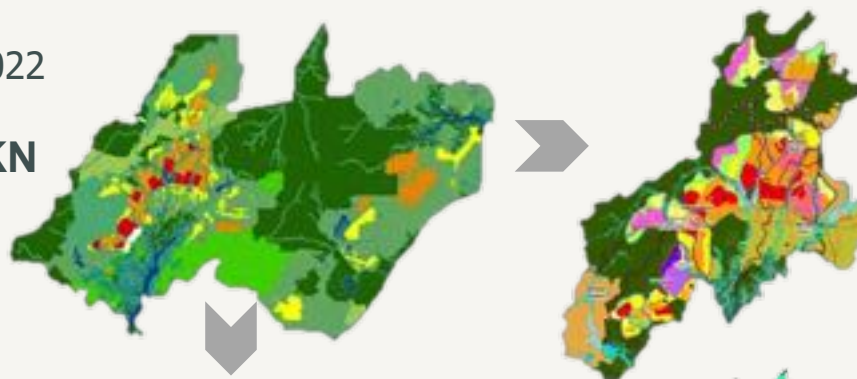
WP MUARA JAWA

- Pusat pelayanan publik
- Pusat kegiatan berbasis pertanian & perikanan
- Perumahan dan Permukiman

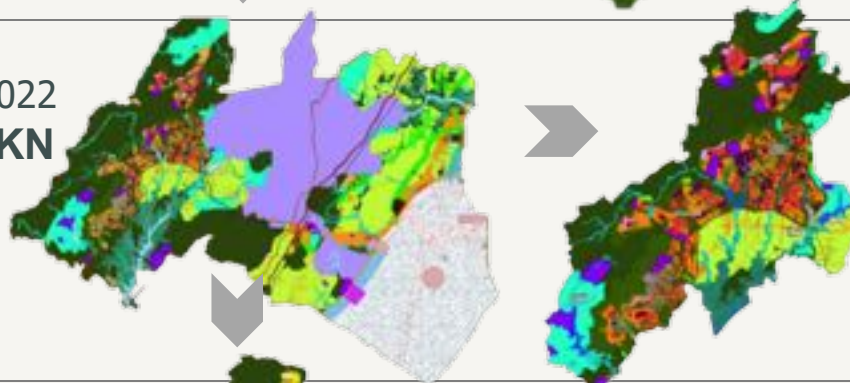


Hierarki Perencanaan Tata Ruang

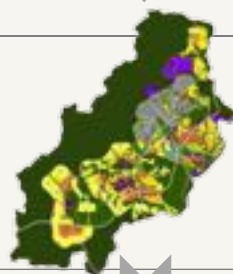
Perpres 63/2022
Perincian
RENDUK IKN
Arahan Tata
Ruang
Skala
1:50.000



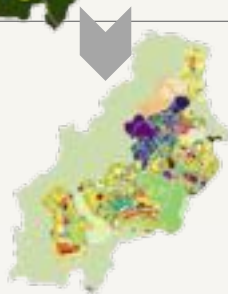
Perpres 64/2022
RTR KSN IKN
Kedalaman
RTRW Kota
Skala
1:25.000



Perka Otorita
RDTR KIPP
Skala
1:5.000



RTBL KIPP
Skala
1:1.000



RTRWN

RZ KAW

RTR PULAU
KALIMANTAN

RTR KSN IKN

RDTR IKN

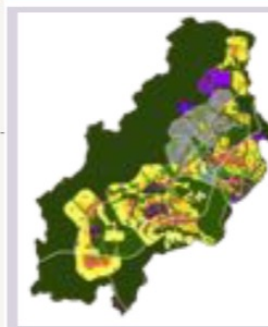
ACUAN PENATAAN RUANG IKN
(Pasal 15 UU IKN)

RENDUK IKN menjadi acuan
bagi penyusunan pengaturan
RTR KSN IKN

Diatur dengan **Perpres**
Skala 1: 25.000

Diatur dengan **Perka OIKN**
Skala 1: 5.000

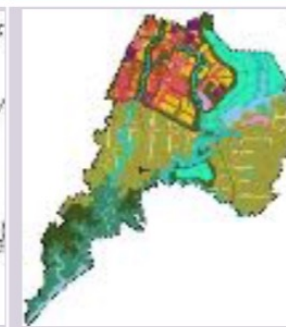
RDTR WP 1
KIPP



RDTR WP 2
IKN Barat



RDTR WP 4
IKN Timur I

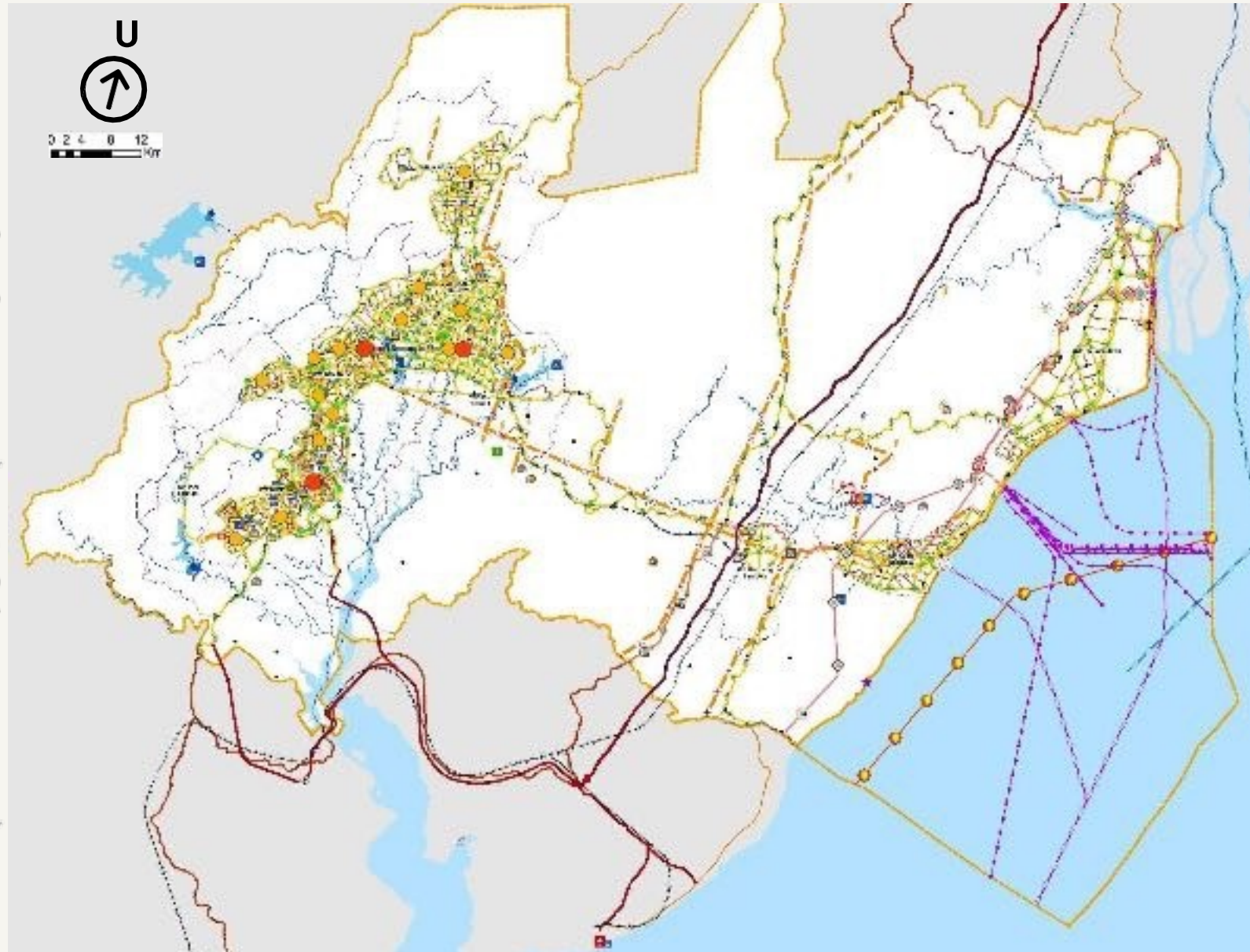


RDTR WP 5
IKN Timur II



Rencana Struktur Ruang RTR KSN IKN

- Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota
 - Sub-Pusat Pelayanan Kota
 - Pusat Pelayanan Lingkungan
- Sistem Infrastruktur Transportasi**
- Bandar Udara Khusus
 - Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
 - Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
 - Stasiun Operasi
 - Stasiun Penumpang
 - Terminal Penumpang Tipe A
 - Terminal Penumpang Tipe B
 - Sentra Kegiatan Perkotaan
 - Pelabuhan Laut
 - Pelabuhan Hutan
 - Pelabuhan Perkotaan
- Sistem Jaringan Jalan**
- Jalan Tol
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Khusus
 - Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota
 - Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan
- Rencana Struktur Ruang Laut**
- Alur Pelayanan
 - Alur Pelayanan dan Perikanan Khusus
 - Pipa Minyak dan Gas Bumi
 - Alur Migrasi Penyusut
- Sistem Infrastruktur Telekomunikasi**
- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Sistem Jaringan Telekomunikasi**
- Jaringan Tetap
- Sistem Infrastruktur Energi**
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
 - Pembangkit Listrik Lainnya
 - Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Sistem Jaringan Energi**
- Sekeloa Utama Tegangan Tinggi (SUTET)
 - Sekeloa Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
 - Jaringan yang Menyebarkan Minyak dan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi Klorin Pengolahan
- Sistem Infrastruktur Sumber Daya Air**
- Bangunan Pengendalian Banjir
 - Bangunan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air**
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Sistem Infrastruktur Perkotaan**
- Unit Air
 - Unit Produksi
 - Stasiun Pemeliharaan Air (SPA)
 - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
 - Tempat Pengelolaan Sampah (Ruang, Reduce, Recycle) (TPSLRC)
 - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - Tempat Evakuasi Bencana
- Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan**
- Jaringan Air
 - Unit Distribusi
 - Jaringan Drainase Primer
 - Jaringan Drainase Sekunder
 - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik



Rencana Pola Ruang RTR KSN IKN

Area Hijau

±84,14%

Terdiri dari Kawasan
Lindung + Kawasan
Tanaman Pangan

±67,75 %

KAWASAN LINDUNG

±32,25 %

KAWASAN BUDIDAYA

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

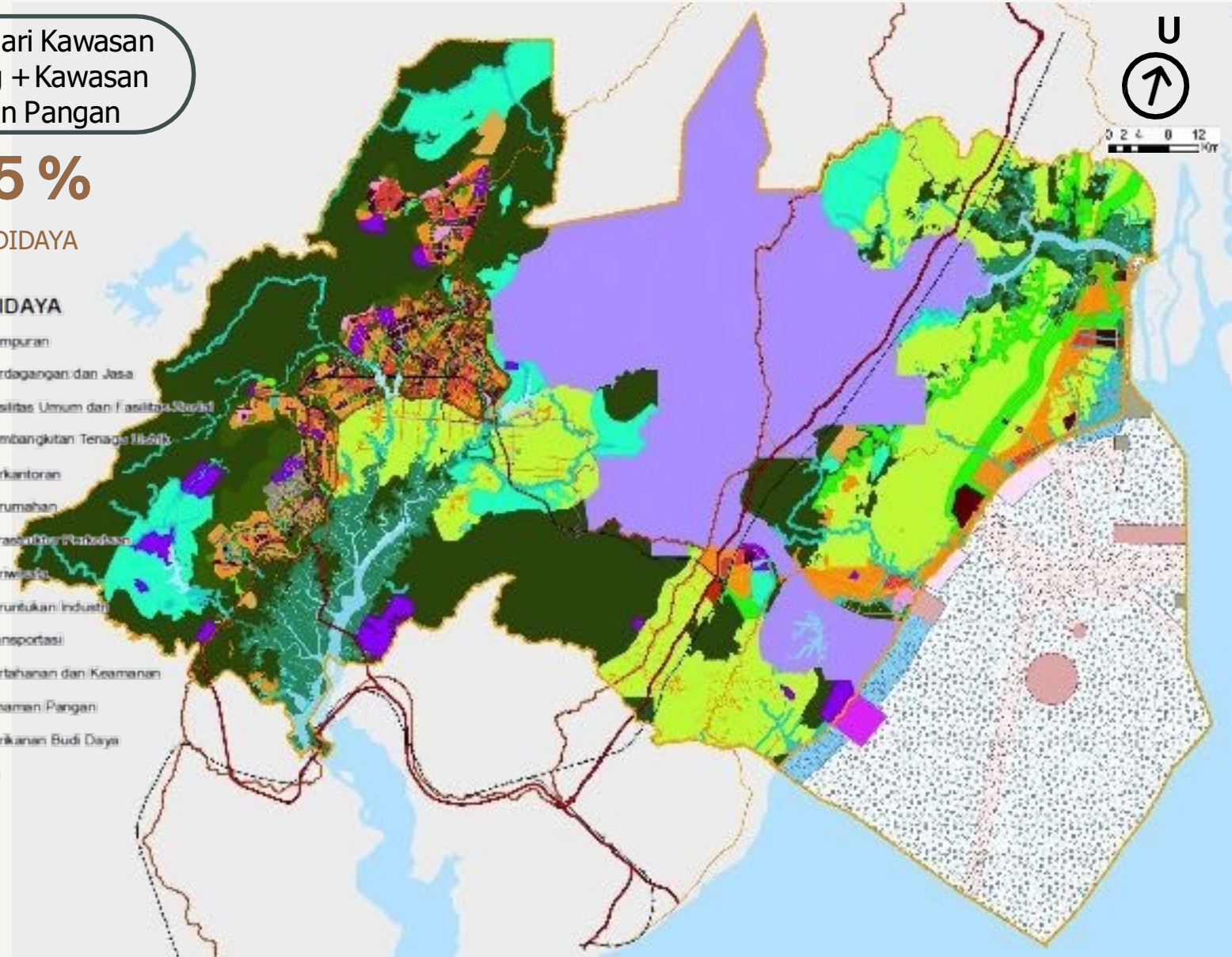
HL	Kawasan Hutan Lindung
TAHURA	Taman Hutan Raya
EM	Kawasan Ekosistem Mangrove
PS	Kawasan Perlindungan Setempat
R-1	Rimba Kota
R-2	Taman Kota
R-3	Taman Kecamatan
R-4	Taman Kelurahan
RTH-8	Jalur Hijau

POLA RUANG LAUT

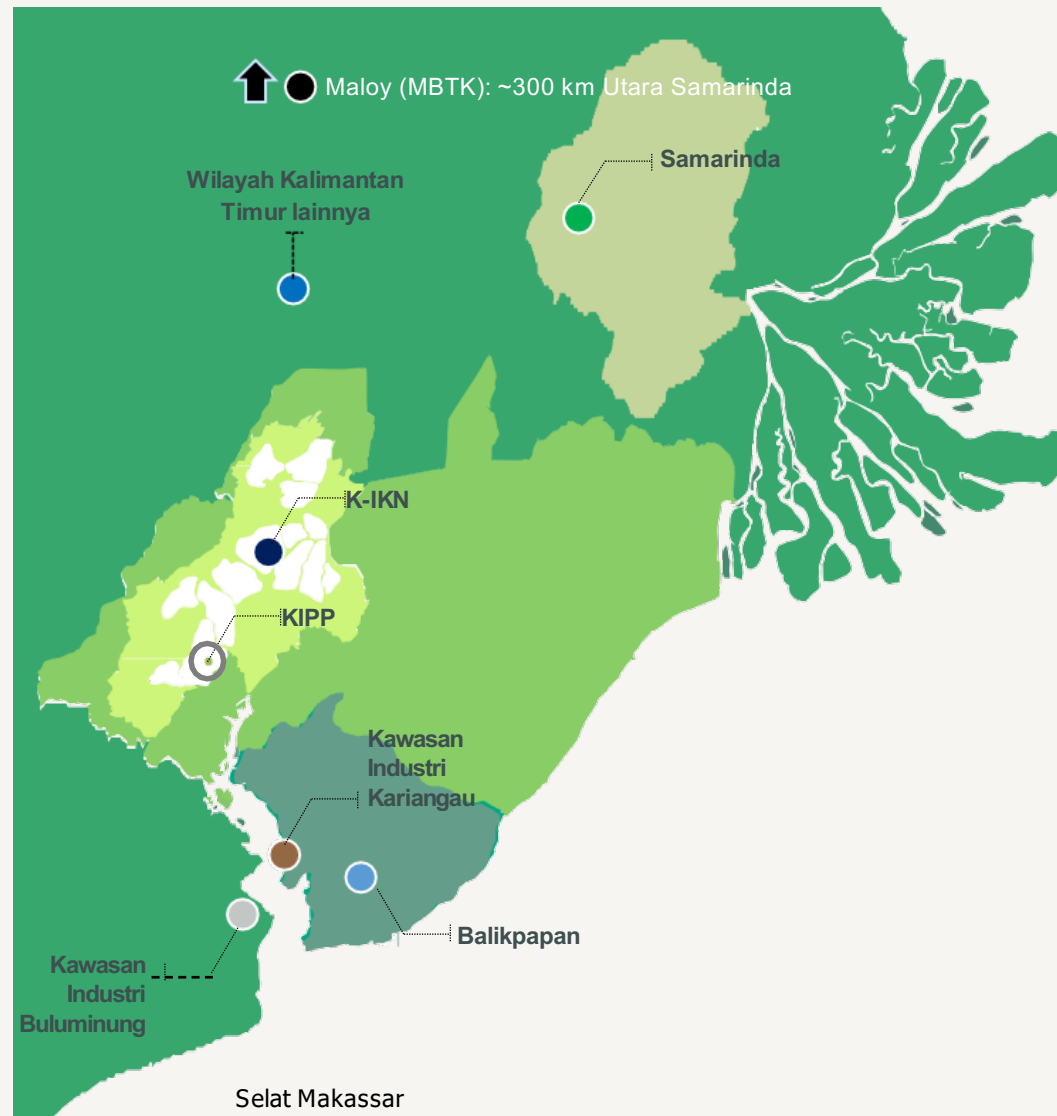
U1	Zona Pariwisata
U3	Zona Pelabuhan Laut
U4	Zona Pelabuhan Perikanan
U5	Zona Pemanfaatan Lainnya
U7	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
U8	Zona Perikanan Tangkap
U2	Zona Permukiman
U18	Zona Pertahanan dan Keamanan
U6	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

KAWASAN BUDIDAYA

C	Kawasan Campuran
K	Kawasan Perdagangan dan Jasa
FUS	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Publik
PTL	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
KT	Kawasan Perkantoran
R	Kawasan Perumahan
IP	Kawasan Infrastruktur Publik
W	Kawasan Pariwisata
PI	Kawasan Peruntukan Industri
TR	Kawasan Transportasi
HK	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
P-1	Kawasan Tanaman Pangan
IK-2	Kawasan Perikanan Budi Daya
BJ	Badan Jalan



Rencana Sebaran Klaster Ekonomi dan Industri di IKN dan Kalimantan Timur



K-IKN (56.180 Ha)

- Pendidikan abad ke-21
- Pusat badan litbang dan inovasi Energi Rendah Karbon
- Ekowisata, Pariwisata Perkotaan, Wisata MICE, Wisata Medis dan Kebugaran, Agroteknologi
- Pusat badan litbang Farmasi Terintegrasi

Samarinda

- Energi Rendah Karbon
- Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Wilayah Kalimantan Timur lainnya

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Ekowisata dan Wisata Alam
- Energi Rendah Karbon: Pertambangan Berkelanjutan dan Gasifikasi Batubara

Maloy (MBTK)

- Energi Rendah Karbon *Biofuels*
- Industri Kimia Maju dan Turunannya Oleokimia

Balikpapan

- Farmasi Terintegrasi
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan

Kawasan Industri Kariangau

- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Petrokimia
- Industri Masa Depan yang Berbasis Energi Terbarukan
- Farmasi Terintegrasi

Kawasan Industri Buluminung

- Industri Pertanian Berkelanjutan
- Industri Kimia Maju dan Turunannya: Oleokimia
- Energi Rendah Karbon: *Biofuels*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

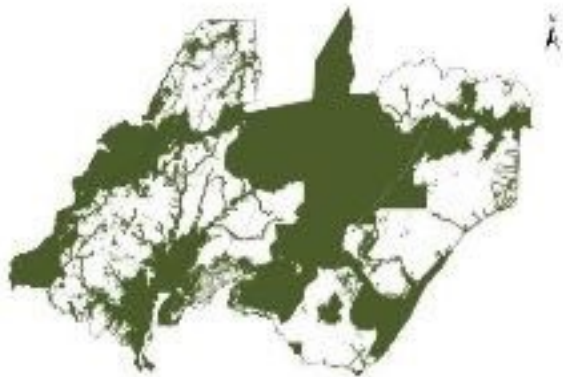
1. Selaras dengan Alam



- 1.1 >75% dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan)
- 1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit
- 1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian

Legenda

- Go Area
- No Go Area



Prinsip dan Strategi

Prinsip Dasar PPLH

- 1 Menjaga dan sekaligus memperbaiki Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH);
- 2 Menghindari risiko dan kerusakan lingkungan hidup;
- 3 Mengoptimalkan kinerja layanan ekosistem;
- 4 Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara efisien;
- 5 Mengurangi kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan sekaligus membantu upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca;
- 6 Memperbaiki & mempertahankan sumber daya keanekaragaman hayati

KRP Rencana Induk IKN diselaraskan dengan 6 Prinsip Dasar PPLH serta diintegrasikan pada pola ruang dan penataan ruang yang mengadopsi alokasi penataan ruang **Go/No Go Area**

Ruang lingkup dari matra PPLH



Air, meliputi perlindungan dan pengelolaan **air permukaan, air tanah dan air laut**;



Udara ambien, meliputi perlindungan dan pengelolaan **kualitas udara dan cuaca iklim mikro**;



Tutupan lahan, meliputi perlindungan dan pengelolaan **fungsi ruang hijau (tutupan hutan danutupan pangan)**;



Tanah, meliputi perlindungan dan pengelolaan **kondisi terrestrial landscape permukaan tanah**;



Atmosfer, meliputi pengelolaan aspek **perubahan iklim**; yang diarahkan pada terselenggaranya IKN yang berstatus **Net Zero Emission**;



Keanekaragaman hayati, meliputi aspek perlindungan dan pengelolaan **keanekaragaman hayati** baik yang berada di wilayah daratan maupun wilayah perairan darat dan laut khususnya di wilayah Teluk Balikpapan.

Strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 1 **Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem terdegradasi** di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara khususnya pada wilayah No Go Area.
- 2 **Mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi** ruang hijau pada wilayah No Go Area.
- 3 **Membangun sarana dan prasarana** yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan, mendukung penerapan sirkular ekonomi dan selaras dengan pencapaian target net zero emission.
- 4 **Pemantauan dan Evaluasi** secara berkala terhadap 6 matra ruang lingkup PPLH, termasuk pendeteksian potensi bencana alam (slow dan rapid onset).

1. Strategi Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem terdegradasi di seluruh wilayah IKN khususnya pada wilayah No Go Area

- 1 **Restorasi dan Pemulihan Ekosistem** di Kawasan hutan;
- 2 **Wanatani/agroforestri** untuk kawasan hutan terdegradasi yang saat ini terlanjur digunakan masyarakat;
- 3 **Restorasi Mangrove**;
- 4 **Pembangunan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** khususnya di wilayah KIPP;
- 5 **Reklamasi bekas tambang**.

2. Strategi mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi ruang hijau pada wilayah No Go Area

- 1 Proses Pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota Nusantara **tidak boleh merusak dan mengganggu** habitat hutan konservasi, hutan lindung, ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta perairan teluk Balikpapan;
- 2 **Pengembangan area konservasi eks-situ**;
- 3 Menetapkan hutan mangrove Teluk Balikpapan dan Sungai Hitam Kuala Samboja sebagai **kawasan lindung**.



3. Strategi pembangunan sarana dan prasarana mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan selaras dengan pencapaian target *net zero emission* dan *circular city*

- 1 **Membangunan green building** untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian target net zero emission dan kota sirkular;
- 2 **Mempertahankan fungsi hidrologi alami** dengan prinsip kota spons melalui pembangunan drainase ramah lingkungan, fungsi wilayah resapan, serta waduk alami dan buatan;
- 3 **Pengelolaan air limbah** domestik dan pengelolaan air limbah industri;
- 4 **Penggunaan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2045** di seluruh wilayah Ibu kota Nusantara;
- 5 **Menerapkan prinsip sirkular** di setiap aspek pada rantai pengelolaan persampahan dan pengolahan limbah B3 terpadu.



4. Strategi pemantauan dan evaluasi terhadap 6 matra ruang lingkup PPLH, termasuk pendeteksian potensi bencana alam (*slow dan rapid onset*)

- 1 **Inventarisasi** dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan status terkini kondisi dari 6 matra lingkungan hidup;
- 2 Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup secara **real time** dengan memanfaatkan teknologi digital dan remote sensing;
- 3 **Strategi lainnya:** (i) penguatan kebijakan dan kelembagaan; (ii) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (iii) peningkatan efektivitas dan pencegahan dan mitigasi bencana; (iv) perkuatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat; (v) pembangunan sistem pintar peringatan dini multi ancaman bencana meliputi gempa, tsunami, cuaca ekstrim, serta kebakaran hutan dan lahan, untuk mendeteksi potensi bencana di wilayah IKN.

Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia Ibu Kota Nusantara



Sosial

- **Pembangunan sosial** dengan mengakui keragaman komunitas yang saat ini tinggal di dalam dan di sekitar lokasi IKN dalam perencanaan dan pengembangan kota,
- **Kerangka strategi sosial** diarahkan untuk mengintegrasikan kegiatan komunikasi, kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial.
- **integrasi sosial ekonomi** dikembangkan untuk membentuk nilai-nilai sosial yang telah ada, membangun keterampilan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat lokal menjadi bagian pembangunan ekonomi IKN.
- **Pemampu (key enablers)** membutuhkan integrasi yang kuat antara kegiatan tata ruang, pembangunan ekonomi, dan komunikasi dalam pengimplementasiannya.



Kesehatan

Framework Kota Sehat IKN

- 3 Komponen kota sehat IKN:
- 1) Individu
 - 2) Masyarakat
 - 3) Lingkungan



Strategi kota sehat:

- Mengarusutamakan Aspek Kesehatan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
- Memperkuat sistem kesehatan termasuk untuk kesiapan penanganan pandemi penyakit



Pendidikan

Prinsip dasar pendidikan di IKN diarahkan kepada konsep pendidikan Abad 21: membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di kluster ekonomi

Strategi pendidikan:

1. Penyediaan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif;
2. Pengembangan *Best in Class Teaching University* dan *Research University*



Ketenagakerjaan

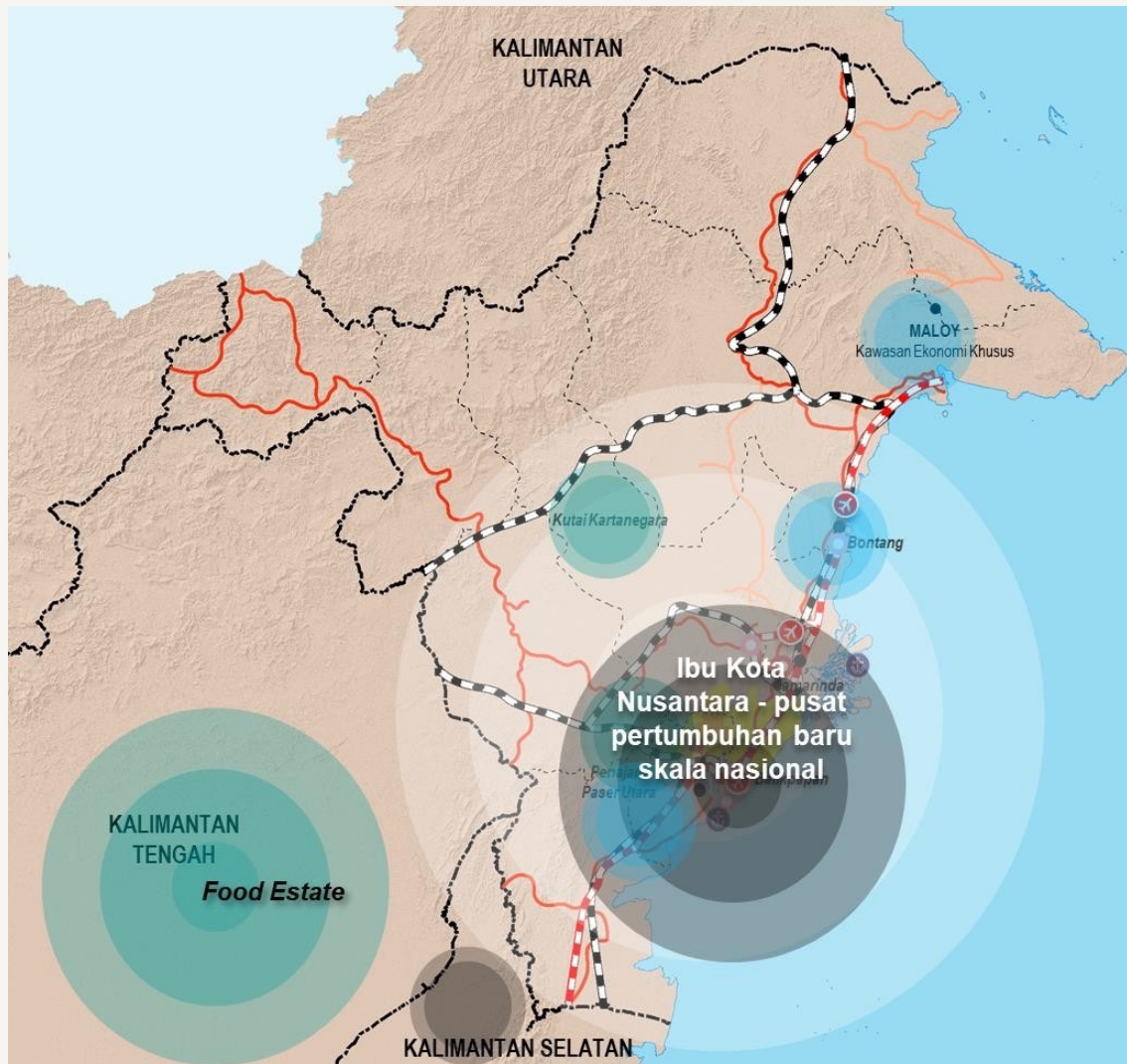
Penciptaan Lapangan Kerja

- Tahap Awal Pembangunan: penciptaan lapangan kerja akan difokuskan pada sektor konstruksi dan sektor pendukung pembangunan (kuliner, pakaian, dan keterampilan lainnya).
- Jangka menengah dan panjang: pemindahan IKN akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi penggerak ekonomi untuk Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Strategi ketenagakerjaan:

Menyiapkan sistem pelatihan dan penyaluran tenaga kerja secara inklusif dan afirmatif sesuai kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara

Kerja Sama Antar Daerah



Pengembangan kerja sama dan kolaborasi IKN dengan Daerah Mitra* dilaksanakan mengacu:



RTR KSN Ibu Kota Nusantara



RTRW Pulau Kalimantan

Sektor pembangunan dalam kerja sama antar daerah:



Ekonomi dan Industri



Logistik dan Konektivitas



SDM dan Ketenagakerjaan



Perlindungan dan Pengelolaan LH



Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Energi dan Ketenagalistrikan



Pertanian dan Ketahanan Pangan



Pengelolaan SDA

***Daerah Mitra** adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN, yang bekerja sama dengan Otorita IKN, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita IKN

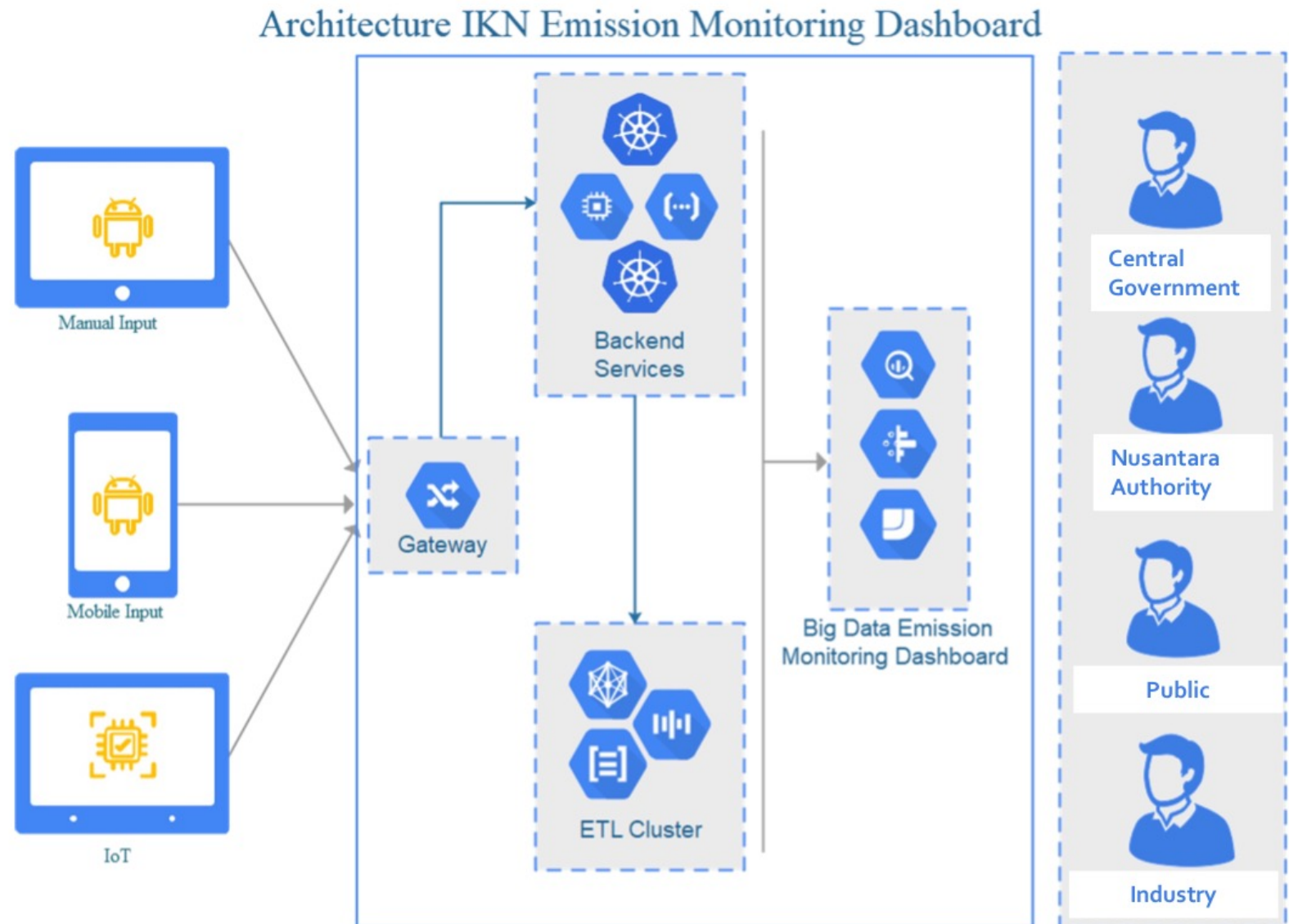
Berdasarkan *Ketentuan Umum Perpres No.63/2022*

Mekanisme kolaborasi dalam Monitoring Emisi GRK di IKN

Draft
Initial Scoping
Analysis:
Towards A
Carbon-Neutral
Nusantara in 2045
v.1.3.1

Landscape Indonesia October 2022

Supported by the
Department of Foreign
Affairs and Trade (DFAT) of
the Government of Australia
Through the ASEAN
Australia Smart Cities Trust
Fund of the Asian
Development Bank (ADB)



Perencanaan di IKN perlu disinergikan dengan Kerangka Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana

Kerangka Kebijakan



5 Area Strategi Reformasi

-  Pembangunan Satu Data Bencana Terintegrasi
-  Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Terpadu
-  Penguatan Ketahanan Sosial melalui Literasi Kebencanaan, Budaya Sadar Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat
-  Penguatan Kelembagaan yang Kolaboratif
-  Peningkatan Investasi dan Sinergi Pendanaan

Tujuan

- Mewujudkan data, informasi dan pengetahuan penanggulangan bencana yang terpadu
- Mengembangkan komunikasi peringatan dini yang efektif dan inklusif
- Mewujudkan masyarakat yang adaptif dan tanggap bencana
- Menguatkan kerjasama dalam penanggulangan bencana
- Mengembangkan pendanaan dan investasi kebencanaan terintegrasi di pusat dan daerah dengan pelibatan pelaku pembangunan non-pemerintah.

Minimal 20% Kab/Kota di Indonesia mencapai tujuan ketahanan bencana

Kerangka Regulasi: UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 6/2018 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Permendagri 101/2018 tentang SPM Sub-urusan Bencana

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) / Digital Platform

SEKTOR TERKAIT

KESEHATAN

SOSIAL

EKONOMI

LINGKUNGAN HIDUP

KEAMANAN

Sumber: Kemendagri, 2021

Otorita Ibu Kota Nusantara

Menara Mandiri Tower II, Lantai 27, Jl. Jend.
Sudirman Kav 54-55, RT.5/RW.3, Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

☎ +62 21 27099100

✉ halo@ikn.go.id

🌐 ikn.go.id

▶ IKN Indonesia

📷 @ikn_id

🐦 @ikn_id

📘 IKN Indonesia